



Partisipasi Masyarakat Desa Sembungan dalam Konservasi Alam

Mohamad Burchanuddin¹, Didin Syarifuddin²

¹Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

²Sekolah Tinggi Pariwisata Ars Internasional

Email: ¹burchan72@gmail.com, ²didinars123@gmail.com

Abstract

This study aims to comprehensively examine community participation in environmental conservation in Sembungan Village, Kejajar District, Wonosobo Regency, the highest village on Java Island, which possesses significant ecotourism potential while simultaneously facing environmental degradation risks resulting from economic and tourism-related activities. The study focuses on identifying forms of community participation in environmental conservation and analyzing the driving and inhibiting factors influencing local engagement in community-based conservation practices. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The research involved eight purposively selected key informants, including the village head, community leaders, tourism managers, farmers, and housewives. The findings reveal that the people of Sembungan Village actively participate in conservation initiatives, including mountain reforestation, domestic waste management, spring water protection, and the strengthening of collective action grounded in local wisdom and communal values. High ecological awareness, economic dependence on environmental sustainability, and strong village institutional support emerged as major driving factors of participation. Conversely, limited technical knowledge, inadequate financial and external support, and relatively low youth involvement constitute major barriers to sustainable participation. These findings underscore the importance of empowering local communities through culturally grounded environmental education, institutional capacity strengthening, and multi-stakeholder partnerships to foster inclusive, adaptive, and sustainable environmental conservation.

Keywords: *Community Participation; Environmental Conservation; Community Empowerment; Local Wisdom; Sembungan Village.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki potensi ekowisata tinggi sekaligus menghadapi ancaman degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan wisata. Penelitian difokuskan pada identifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian alam serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keterlibatan warga dalam konservasi berbasis komunitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas delapan orang yang meliputi kepala desa, tokoh masyarakat, pengelola wisata, petani, dan ibu rumah tangga yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sembungan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan

konservasi, seperti penghijauan kawasan pegunungan, pengelolaan sampah domestik, perlindungan sumber mata air, serta penguatan praktik gotong royong berbasis kearifan lokal. Tingginya kesadaran ekologis, ketergantungan ekonomi terhadap kelestarian lingkungan, serta dukungan kelembagaan desa menjadi faktor utama pendorong partisipasi. Sementara itu, keterbatasan pengetahuan teknis, minimnya dukungan finansial dan eksternal, serta rendahnya keterlibatan generasi muda menjadi hambatan utama. Temuan ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal, pendidikan lingkungan berbasis budaya, dan penguatan kemitraan multipihak guna menciptakan konservasi alam yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat; Konservasi Lingkungan; Pemberdayaan Komunitas; Kearifan Lokal; Desa Sembungan*

A. Pendahuluan

Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dikenal sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa yang terletak di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, desa ini memiliki lanskap alam pegunungan yang unik berupa hutan pinus, mata air pegunungan, serta beragam potensi wisata alam. Di satu sisi, potensi tersebut mampu meningkatkan sumber pendapatan masyarakat melalui pengembangan pariwisata pedesaan; di sisi lain, kegiatan ekonomi dan pariwisata yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, seperti penebangan pohon tanpa izin, alih fungsi lahan pertanian produktif, hingga pencemaran telaga akibat limbah wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wilayah wisata berbasis lingkungan memerlukan tata kelola yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi (Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, 2021). Penelitian mengenai pariwisata berkelanjutan juga menunjukkan bahwa keberhasilan destinasi wisata pedesaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan tata kelola wisata secara partisipatif (Ginting, 2023). Dengan demikian, masyarakat lokal memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan sambil memaksimalkan manfaat ekonomi berkelanjutan.

Dalam praktik sehari-hari, masyarakat Sembungan menampilkan inisiatif kolektif berbasis kebersamaan, seperti penyediaan homestay, menjaga kebersihan lingkungan, dan mempertahankan nilai-nilai adat setempat. Pendekatan semacam ini menggarisbawahi

pentingnya penerapan prinsip pembangunan berbasis masyarakat, di mana penduduk lokal diberdayakan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan (Asy'ari, R., & Putra 2023; Lemos, M. C., & Agrawal 2016). Studi terbaru menunjukkan bahwa pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat mampu memperkuat keberlanjutan sosial dan meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan, terutama ketika masyarakat diberi ruang untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan (Latifah, 2024; Maulina, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan tidak sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi pembangunan berkelanjutan. Berbagai studi menegaskan bahwa lingkungan dan masyarakat saling terkait dalam suatu sistem sosio-ekologis; keberhasilan konservasi sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga sumber daya alam (Berkes, F., Colding, J., & Folke, 2023). Selain itu, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan ekowisata berkontribusi terhadap meningkatnya kepedulian ekologis, pengawasan sosial terhadap lingkungan, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata (Hassan, 2026). Sebagai contoh, penelitian Qodriyatun (2019) di kawasan konservasi menunjukkan bahwa model pengelolaan kolaboratif memungkinkan komunitas lokal berkontribusi dalam zonasi, pemanfaatan, dan rehabilitasi ekosistem. Di Indonesia, konteks serupa tercermin dalam pelaksanaan program perhutanan sosial yang memberi akses lebih besar kepada masyarakat lokal (Lemos, M. C., & Agrawal 2016; Blackman, A., Corral, L.,

Lima, E. S., & Asner, 2017), sehingga memupuk semangat partisipasi sekaligus menekan ancaman kerusakan lingkungan. Artinya, pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas setempat (Lemos, M. C., & Agrawal, 2016).

Konteks sosio-budaya masyarakat Sembungan juga memiliki pengaruh kuat terhadap pola partisipasi lingkungan. Nilai gotong royong, norma religius, serta aturan adat yang melarang praktik merusak alam menjadi fondasi moral kolektif masyarakat (Iswandono, E., Zuhud, E. A. M., Hikmat, A., Kosmaryandi, M. Y., & Nandi, 2015). Dalam konteks pembangunan wisata berbasis masyarakat, partisipasi lokal terbukti berperan penting dalam memperkuat ketahanan budaya dan menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan aktivitas ekonomi masyarakat (Rahmawati et al., 2024). Selain itu, partisipasi masyarakat yang kuat dalam pengelolaan wisata berkelanjutan dapat memperkuat kesadaran ekologis dan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap lingkungan lokal, sehingga praktik konservasi lebih mungkin berlangsung secara konsisten (Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, 2021). Oleh karena itu, pembangunan ramah lingkungan pada akhirnya hanya dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas, partisipasi, dan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Berkes, F., Colding, J., & Folke, 2023).

Kendati demikian, partisipasi masyarakat tidak terjadi secara otomatis. Berbagai teori pengembangan masyarakat menekankan perlunya memerhatikan tingkat partisipasi warga secara aktif, tidak hanya sebagai penerima manfaat pasif. Partisipasi yang lebih bermakna baru terwujud ketika masyarakat memiliki kesempatan nyata untuk berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program konservasi (Lemos, M. C., & Agrawal, 2016; Asy'ari, R., & Putra, 2023). Misalnya, Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar (2021) menyoroti bahwa destinasi ekowisata yang sukses menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek wisata, sehingga manfaat

ekonomi dan keberlanjutan ekologis dapat berjalan bersama. Sebaliknya, jika masyarakat hanya dilibatkan seolah formalitas, kepedulian lingkungan cenderung dangkal dan solusi menjadi kurang berkelanjutan.

Penelitian lapangan di Desa Sembungan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendeskripsikan bentuk konkret partisipasi warga dalam program konservasi alam dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini penting mengingat literatur terkait peran serta masyarakat dalam konservasi masih terbatas di konteks desa pegunungan Indonesia. Dengan kerangka pemikiran tersebut, fokus penelitian dirumuskan dalam dua persoalan utama: (1) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Sembungan dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan ekosistem; (2) faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam program konservasi berbasis komunitas. Tujuan penelitian atas dasar permasalahan yang telah disampaikan adalah pertama, mengidentifikasi berbagai aktivitas dan mekanisme partisipasi masyarakat Desa Sembungan dalam upaya konservasi alam; dan kedua, menganalisis faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat keterlibatan warga dalam pelestarian lingkungan. Pemetaan mendalam terhadap partisipasi dan faktor-faktor terkait diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat yang kontekstual dan adaptif.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dipahami sebagai keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran secara administratif, tetapi juga mencakup keterlibatan nyata masyarakat dalam pengambilan keputusan, kontribusi sumber daya, serta pengawasan terhadap keberlangsungan program lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam

meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Lijun Dong (2023), partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan memiliki hubungan positif dengan efektivitas tata kelola lingkungan karena masyarakat yang terlibat cenderung meningkatkan pengawasan sosial, kepedulian ekologis, dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat juga memperkuat kapasitas komunitas dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Jessica T. Erbaugh (2024) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan yang efektif membutuhkan komunikasi dua arah dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses deliberasi publik. Dalam konteks pelestarian lingkungan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi turut berperan dalam proses identifikasi masalah lingkungan, penyusunan solusi, hingga pengawasan implementasi kebijakan. Pendekatan partisipatif semacam ini memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan dan mendorong perubahan perilaku ekologis masyarakat.

Selanjutnya, Dai (2024) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna dipengaruhi oleh akses informasi, dukungan pemerintah, kesadaran lingkungan, serta kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi yang tinggi tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, pemantauan kondisi lingkungan, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Antwi (2025) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan harus mencakup keterlibatan pada seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program. Keterlibatan tersebut memungkinkan masyarakat membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pelestarian lingkungan sehingga keberlanjutan program lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.

Selain itu, Zhang et al. (2020) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan mampu meningkatkan perilaku pro-lingkungan, memperkuat kesadaran ekologis, dan membantu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dimensi partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, kontribusi tenaga dan sumber daya, pengawasan kegiatan, evaluasi program, komunikasi kolaboratif, serta kemampuan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan secara kolektif. Partisipasi yang bermakna tidak sekadar hadir secara formal, tetapi melibatkan kontribusi nyata masyarakat dalam menentukan arah pembangunan berbasis komunitas dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlangsungan fungsi ekologis bagi generasi mendatang. Berkes, F., Colding, J., & Folke, (2023) menjelaskan bahwa konservasi berbasis komunitas merupakan bagian dari sistem sosio-ekologis, yaitu keterhubungan antara manusia dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Dimensi pelestarian lingkungan mencakup perlindungan sumber daya air, konservasi tanah, pengelolaan vegetasi, pengurangan pencemaran, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Penelitian Blackman, A., Corral, L., Lima, E. S., & Asner, (2017) menunjukkan bahwa penguatan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya lokal dapat meningkatkan efektivitas konservasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas. Dengan demikian, keberhasilan pelestarian lingkungan bergantung pada kapasitas masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem.

Selain aspek struktural, partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan juga

dipengaruhi oleh dimensi sosial budaya dan kearifan lokal. Menurut Iswandono, E., Zuhud, E. A. M., Hikmat, A., Kosmaryandi, M. Y., & Nandi, (2015), nilai adat, norma sosial, dan praktik budaya lokal menjadi fondasi pembentukan kesadaran ekologis masyarakat. Dimensi kearifan lokal meliputi nilai gotong royong, norma adat perlindungan alam, tanggung jawab kolektif, dan sistem pengendalian sosial terhadap perilaku yang merusak lingkungan. Selanjutnya, penelitian

Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis wisata hanya dapat berlangsung ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam menjaga kebersihan, konservasi, dan keberlanjutan destinasi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan perlu dipahami sebagai proses multidimensi yang dipengaruhi oleh kapasitas komunitas, tata kelola kolaboratif, dan kekuatan nilai sosial budaya lokal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengungkap secara mendalam bagaimana masyarakat Desa Sembungan berpartisipasi dalam konservasi lingkungan. Metode kualitatif dipilih karena menekankan pemahaman terhadap makna sosial di balik fenomena nyata, bukan sekadar angka statistik (Denzin, N. K., & Lincoln, 2015). Dengan pendekatan ini peneliti dapat menggali persepsi, sikap, dan praktik warga secara holistik dan kontekstual sesuai realitas sosial setempat. Dalam praktiknya, wawancara semi-terstruktur menjadi metode utama pengumpulan data, dimana informan diberi kebebasan menyampaikan pandangannya (Patton, 2022). Observasi partisipatif dan dokumentasi lapangan juga dilakukan untuk memperkaya data, misalnya melalui kunjungan langsung ke lokasi konservasi dan pengumpulan dokumen desa terkait program lingkungan.

Lokasi penelitian adalah Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Desa ini dipilih secara purposive karena dikenal aktif melaksanakan pelestarian alam dan mengembangkan ekowisata. Pemilihan metode purposif memungkinkan fokus pada keberagaman kelompok sosial yang berkontribusi. Informan kunci berjumlah delapan orang, dipilih berdasarkan peran strategis mereka dalam konservasi desa. Informan tersebut meliputi satu Kepala Desa, Sekretaris Desa, beberapa perangkat desa yang menangani lingkungan, dua tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam kegiatan

lingkungan, satu pengelola kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dua petani yang menerapkan pertanian ramah lingkungan, dan satu ibu rumah tangga aktif dalam pengelolaan sampah serta edukasi lingkungan. Teknik snowball juga dipakai ketika perlu memperluas jumlah narasumber relevan.

Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dan terekam untuk dianalisis lebih lanjut. Pertanyaan wawancara berpusat pada pengalaman informan tentang kegiatan konservasi, persepsi terhadap perubahan lingkungan, serta hambatan dan dukungan yang dialami. Selain itu, peneliti berpartisipasi dalam kegiatan warga seperti penanaman pohon dan gotong royong bersih desa untuk memperkuat pemahaman konteks. Dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan arsip (misalnya berita desa, peraturan adat) juga dikumpulkan sebagai data pendukung. Untuk meningkatkan keabsahan data, dilaksanakan triangulasi sumber (berbagai informan) dan teknik (wawancara, observasi, dokumentasi) secara sistematis (Patton, 2022). Dengan cara ini hasil analisis diharapkan lebih kredibel dan dapat diandalkan.

Analisis data mengikuti langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi dipilih untuk menyoroti informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, lalu diringkas dalam bentuk narasi deskriptif. Proses analisis dilakukan secara interaktif dengan meninjau kembali data yang telah dikumpulkan untuk membangun

pola pemahaman (Creswell, John W. dan Creswell, 2018). Tahapan ini sejalan dengan model interaktif yang banyak dipakai dalam analisis kualitatif (Denzin, N. K., & Lincoln, 2015). Pentingnya peran subjek dan konteks juga menjadi perhatian; oleh karena itu analisis

tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana pengalaman dan norma lokal membentuk partisipasi tersebut. Hasil akhir berupa uraian temuan dan konteks pendukungnya, yang selanjutnya dibandingkan dengan temuan dari studi lain dalam diskusi.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Desa Sembungan berada di kawasan Pegunungan Dieng, Wonosobo, dan dikenal memiliki ekosistem pegunungan unik serta potensi wisata alam yang besar. Dalam studi ini ditemukan bahwa masyarakat desa secara aktif terlibat dalam pelestarian lingkungan melalui beragam kegiatan nyata. Berdasarkan analisis delapan informan kunci, sejumlah bentuk partisipasi yang utama adalah sebagai berikut:

1. Penghijauan dan Perbaikan Lahan. Warga secara sukarela rutin melakukan penanaman pohon pada area-area kritis yang rawan longsor atau gundul. Mereka mendirikan kebun bersama dan melakukan pembibitan pohon secara mandiri untuk menambah tutupan vegetasi pegunungan. Kegiatan ini dilakukan penuh kesadaran kolektif, misalnya gotong royong masyarakat menyemai benih pohon dan menanamnya di tebing-tebing curam yang terdegradasi.
2. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas. Masyarakat membentuk sistem pengelolaan sampah sederhana secara swakelola. Mereka memilah sampah organik dan anorganik di rumah dan menetapkan tempat sampah terpadu di beberapa lokasi strategis desa. Sampah organik diolah menjadi kompos yang kemudian digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah pertanian warga. Upaya ini juga melibatkan edukasi tentang kebersihan kepada wisatawan yang berkunjung, sehingga mendorong kesadaran bersama menjaga lingkungan bebas sampah plastik.
3. Pelestarian Sumber Daya Air dan Adat. Masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan mata air dan danau di sekitar

- desa (misalnya Telaga Warna dan Telaga Pengilon) dengan cara membersihkan area pesisir, menanam vegetasi penahan erosi, dan melakukan gotong royong rutin. Selain itu, desa menerapkan aturan adat (awig-awig) yang menegaskan larangan mencemari atau merusak sumber air. Aturan lokal tersebut juga meliputi larangan penebangan pohon sembarangan dan pembakaran lahan, sehingga nilai-nilai kearifan lingkungan terjaga dalam praktik sehari-hari. Pelibatan pemuka adat dan tokoh agama memperkuat kedisiplinan warga terhadap norma ini.
4. Pemberdayaan Kelembagaan Lokal. Desa Sembungan memiliki beberapa lembaga masyarakat yang menjadi wadah partisipasi terstruktur. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif menyelenggarakan pelatihan internal bagi anggotanya mengenai konservasi dan pengelolaan potensi wisata. Kelompok tani desa secara rutin bertukar pengalaman tentang pertanian organik dan pola tanam ramah lingkungan. Kegiatan seperti demplot tanaman hortikultura beragam, penerapan sistem gilir tanaman, dan konservasi lahan pertanian diperkenalkan dalam forum desa. Anak-anak sekolah dasar juga dilibatkan melalui program menanam pohon di lingkungan sekolah serta kunjungan edukasi ke hutan desa. Selain itu, warga membangun sarana fisik seperti jalur pendakian hutan yang dibikin teratur guna mencegah kerusakan vegetasi, serta tempat pengolahan sampah komunal. Semua kegiatan kolektif ini menunjukkan adanya integrasi antara konservasi alam dan pengembangan ekowisata, di mana peningkatan kualitas

lingkungan berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat.

5. Keterlibatan Formal dan Kemitraan. Warga Desa Sembungan aktif menggunakan mekanisme formal pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi lingkungan. Musyawarah desa rutin dijadikan forum warga mengajukan usulan terkait konservasi, seperti usulan anggaran reboisasi atau sumber air bersih. Pemerintah desa juga mengajak warga bermitra dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan setempat untuk pendampingan teknis. Di beberapa program konservasi, masyarakat bukan hanya pemberi data, tetapi dilibatkan dalam penyusunan rencana dan evaluasi. Bahkan pada kegiatan konservasi wisata, Pokdarwis berperan sebagai pengelola utama bersama aparat desa. Dengan kata lain, warga Sembungan menunjukkan bentuk partisipasi yang lebih tinggi, seperti kemitraan dan pengambilan keputusan kolektif, yang tercermin dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya.

Secara keseluruhan, aktivitas-aktivitas di atas mengindikasikan derajat partisipasi masyarakat di Sembungan yang cukup tinggi. Warga tidak hanya menjalankan instruksi, melainkan memberikan inisiatif sendiri dan mengambil peran aktif dalam segala tahap program konservasi. Tinjauan kualitatif menunjukkan bahwa partisipasi ini bersifat holistik dan substantif, menggabungkan tindakan fisik (penghijauan, sampah, dll.) dengan partisipasi dalam kebijakan lokal dan penyuluhan. Temuan ini menggarisbawahi modal sosial desa yang kuat: solidaritas, norma gotong royong, dan tanggung jawab kolektif yang menjadi aset penting dalam pelestarian lingkungan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sembungan memiliki

kesadaran ekologis yang tinggi terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Konsep kesadaran ini tercermin dalam tindakan nyata: penghijauan wilayah pegunungan dan pengelolaan sampah domestik sebagai upaya preventif kerusakan lingkungan. Pola partisipasi yang tampak bersifat proaktif dan mandiri menunjukkan bahwa norma budaya lokal (misalnya larangan adat) telah membentuk pemahaman kolektif sehingga warga merasa memiliki tanggung jawab atas alam di sekelilingnya. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa nilai-nilai budaya dan identitas lokal memainkan peran penting dalam konservasi (Iswandono, E., Zuhud, E. A. M., Hikmat, A., Kosmaryandi, M. Y., & Nandi, 2015; Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar 2021). Misalnya, studi Iswandono, E., Zuhud, E. A. M., Hikmat, A., Kosmaryandi, M. Y., & Nandi (2015) di daerah Manggarai juga menemukan bahwa integrasi nilai budaya lokal menjadi fondasi pelestarian hutan oleh masyarakat adat. Di Desa Sembungan, aturan tradisional dan ritual keagamaan serupa telah menanamkan pemahaman ekologis sejak lama, yang sejalan dengan konsep *pembangunan berkelanjutan* berbasis masyarakat (Berkes, F., Colding, J., & Folke, 2023).

Secara kelembagaan, dukungan struktural dari desa menjadi pendorong kuat partisipasi masyarakat. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan kelompok tani bertindak sebagai wahana kerja sama dan transfer pengetahuan. Keberadaan forum musyawarah desa memungkinkan tercapainya kemitraan multi-pihak (multi-stakeholder) yang efektif. Temuan ini sesuai dengan kajian Lemos, M. C., & Agrawal (2016) yang menyoroti pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks Sembungan, kolaborasi antara warga, pemerintah desa, dan LSM berhasil menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, tidak hanya sekadar mitra pelaksana. Hasil serupa dilaporkan Qodriyatun (2019) dalam studi kawasan konservasi, yaitu bahwa pengelolaan kolaboratif membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam zonasi dan rehabilitasi. Di Sembungan, misalnya, warga secara langsung

memanfaatkan organiknya (gambut dan kompos) dalam pertanian desa, melalui forum pembahasan yang inklusif. Dengan demikian, partisipasi warga di sini masuk pada tingkatan 'kemitraan' hingga 'kontrol penuh' dalam banyak kegiatan (Qodriyatun, 2019).

Namun, analisis juga mengungkap kendala signifikan. Pengetahuan teknis konservasi yang relatif terbatas masih menjadi hambatan. Masyarakat mengandalkan kearifan lokal, namun belum selalu memahami teknik konservasi modern (misalnya teknik konservasi tanah erosi atau sistem irigasi hemat air). Kondisi ini sejalan dengan temuan Agusti, V. N., & Wibawani (2023) bahwa tanpa pelatihan dan edukasi yang memadai, partisipasi warga cenderung terbatas pada keterampilan tradisional. Di Desa Sembungan, petani yang tergabung dalam kelompok tani harus menyesuaikan pola tanam organik dengan bimbingan minimal dari ahli, sehingga praktik ramah lingkungan belum merata. Selain itu, dukungan finansial dan teknis dari pemerintah atau lembaga eksternal masih kurang memadai. Hambatan pendanaan ini mirip dengan kondisi yang dilaporkan oleh Adebayo, A. D., & Butcher (2021) di Nigeria, di mana masyarakat lokal menyatakan bahwa insentif dan pendampingan eksternal sangat krusial agar inisiatif mereka berkembang. Dalam konteks Sembungan, minimnya bantuan modal dan peralatan menghambat skala kegiatan, misalnya sulitnya menyediakan dana besar untuk mereklamasi lahan kritis.

Faktor budaya dan sosial juga memengaruhi partisipasi. Secara positif, kepercayaan agama dan norma gotong royong meningkatkan motivasi masyarakat untuk bekerja sama. Nilai kebersamaan (komunalitas) yang tinggi menciptakan modal sosial kuat yang mendorong keterlibatan tanpa pamrih. Hal ini menegaskan kembali bahwa kepedulian lingkungan di Sembungan telah terinternalisasi dalam budaya lokal (Iswandono, E., Zuhud, E. A. M., Hikmat, A., Kosmaryandi, M. Y., & Nandi, 2015). Sebaliknya, struktur sosial desa yang patriarkal dan tradisional menyebabkan sebagian perempuan dan generasi muda kurang terlibat. Meskipun ibu-ibu PKK ikut serta dalam kegiatan, peran mereka cenderung di

ranah domestik; sementara pemuda desa masih terjebak pada migrasi musiman. Kesenjangan sosial-ekonomi ini mengindikasikan kebutuhan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif. Literasi lingkungan dan pelibatan generasi muda perlu ditingkatkan agar transfer pengetahuan lokal berjalan berkesinambungan (Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, 2021).

Secara keseluruhan, praktik konservasi berbasis masyarakat di Sembungan menunjukkan kecocokan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sumberdaya alam. Komitmen kolektif warga memperlihatkan model pembangunan berkelanjutan yang berpijak pada kearifan lokal dan kesehatan ekologi (Berkes, F., Colding, J., & Folke 2023; Asy'ari, R., & Putra 2023). Model ini menegaskan bahwa keberhasilan konservasi jangka panjang sulit dicapai tanpa partisipasi aktif warga yang memiliki kepentingan langsung. Studi ini selaras dengan literatur internasional yang menekankan bahwa destinasi ekowisata dan pembangunan pedesaan harus menempatkan komunitas lokal sebagai pelaku utama (Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, 2021; Iqbal, A., Ramachandran, S., Siow, M. L., Subramaniam, T., & Afandi, 2022). Oleh karena itu, pengalaman Desa Sembungan dapat menjadi contoh bagi pengembangan desa wisata lain di Indonesia, di mana aspek sosial-budaya dan ekologi diselaraskan melalui kolaborasi lintas sektor.

Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Alam

Partisipasi masyarakat dalam konservasi alam pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya sebagai keterlibatan fisik warga dalam menjaga lingkungan, melainkan sebagai proses sosial yang mencerminkan kesadaran kolektif, rasa memiliki terhadap sumber daya alam, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks Desa Sembungan, partisipasi tersebut tampak melalui keterlibatan warga dalam penghijauan wilayah pegunungan, pengelolaan sampah domestik, serta upaya menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan wisata dan

pertanian. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang alam sekadar sebagai objek ekonomi, tetapi sebagai bagian penting dari keberlangsungan hidup sosial mereka. Kondisi tersebut memperlihatkan hubungan erat antara masyarakat dan lingkungan sebagai suatu sistem yang saling bergantung, sebagaimana dijelaskan oleh Berkes, F., Colding, J., & Folke (2023) bahwa keberhasilan konservasi bergantung pada hubungan timbal balik antara manusia dengan sistem ekologis di sekitarnya. Dalam perspektif sosiologis, pola demikian menunjukkan terbentuknya kesadaran ekologis kolektif, yakni kondisi ketika masyarakat secara sadar membangun tindakan bersama demi menjaga sumber daya lingkungan secara berkelanjutan.

Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam konservasi alam juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal yang mampu membangun ruang kolaborasi antarwarga. Di Desa Sembungan, keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok tani, dan forum musyawarah desa menjadi medium penting bagi masyarakat untuk saling bertukar pengetahuan, menyusun strategi, dan menentukan langkah bersama dalam pengelolaan lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konservasi tidak berjalan secara individual, melainkan lahir melalui mekanisme sosial yang memungkinkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab. Menurut Lemos, M. C., & Agrawal (2016), tata kelola sumber daya alam yang efektif menuntut adanya model kolaboratif yang memberi ruang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Asy'ari, R., & Putra (2023) yang menyatakan bahwa pembangunan berbasis masyarakat hanya akan berhasil apabila warga tidak diposisikan sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai aktor utama pembangunan. Dengan demikian, konservasi alam di Desa Sembungan memperlihatkan adanya transformasi peran masyarakat dari objek kebijakan menjadi subjek yang aktif menentukan keberlanjutan lingkungannya.

Selain faktor kelembagaan, kekuatan budaya lokal menjadi unsur yang sangat penting

dalam membentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi alam. Kehidupan sosial masyarakat Sembungan yang masih kuat dengan nilai gotong royong, norma adat, serta keyakinan religius menjadikan pelestarian lingkungan bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab moral bersama. Larangan merusak alam, menjaga kebersihan sumber air, hingga semangat bekerja bersama dalam kegiatan penghijauan menunjukkan bahwa nilai budaya telah membentuk perilaku ekologis masyarakat sejak lama. Hal ini mempertegas pandangan Iswandono, E., Zuhud, E. A. M., Hikmat, A., Kosmaryandi, M. Y., & Nandi, (2015) bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan melalui norma, simbol, dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, penelitian Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan wisata berbasis lingkungan sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat lokal menjaga nilai budaya sebagai fondasi keberlanjutan ekologi. Dalam konteks ini, masyarakat Sembungan memperlihatkan bagaimana budaya lokal dapat menjadi modal sosial yang memperkuat solidaritas ekologis dan memperbesar tingkat keterlibatan masyarakat dalam konservasi alam.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam konservasi alam tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat memengaruhi keberlangsungannya. Salah satu hambatan yang tampak ialah keterbatasan pengetahuan teknis mengenai praktik konservasi modern, seperti pengelolaan erosi tanah, sistem pertanian ramah lingkungan, atau teknik konservasi air. Masyarakat memang memiliki pengalaman lokal yang kaya, tetapi tanpa dukungan edukasi dan pendampingan yang memadai, kapasitas tersebut dapat berkembang secara lambat. Dalam hal ini, penelitian Agusti dan Wibawani (2023) menegaskan bahwa keterbatasan literasi lingkungan serta minimnya pelatihan teknis sering kali menyebabkan partisipasi masyarakat hanya bertumpu pada pengalaman tradisional. Selain itu, keterbatasan modal, sarana, dan

dukungan kelembagaan eksternal juga menjadi tantangan nyata. Menurut Adebayo dan Butcher (2021), keberhasilan program konservasi berbasis komunitas memerlukan dukungan insentif, pendampingan, dan penguatan kapasitas agar masyarakat mampu mempertahankan inisiatif konservasi dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam konservasi alam di Desa Sembungan memperlihatkan bahwa pelestarian lingkungan akan lebih efektif ketika masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan. Keterlibatan warga yang tumbuh melalui kesadaran ekologis, dukungan kelembagaan, kekuatan budaya lokal, serta semangat gotong royong menunjukkan bahwa konservasi alam pada hakikatnya merupakan proses sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat. Perspektif ini memperkuat argumentasi Fikret Berkes dkk. (2023) bahwa keberlanjutan lingkungan hanya dapat diwujudkan apabila komunitas lokal memiliki kapasitas, akses, dan ruang partisipasi yang cukup dalam mengelola sumber daya alam. Dengan demikian, pengalaman Desa Sembungan memberikan gambaran sosiologis bahwa konservasi alam tidak cukup dibangun melalui regulasi formal, melainkan membutuhkan internalisasi nilai, kerja sama sosial, dan penguatan peran masyarakat secara berkelanjutan sebagai inti dari pembangunan berbasis komunitas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sembungan menjalankan bentuk partisipasi konservasi lingkungan yang sangat aktif dan substantif. Bentuk-bentuk tersebut meliputi kegiatan penghijauan (penanaman pohon dan rehabilitasi lahan kritis), pengelolaan sampah berbasis kompos, perlindungan mata air, serta pelestarian kearifan lokal melalui aturan adat lingkungan. Partisipasi warga tercermin tidak hanya dalam aksi lapangan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan kolektif (forum musyawarah desa dan Pokdarwis).

Faktor pendorong utama partisipasi ini antara lain tingginya kesadaran ekologis karena ketergantungan pada sumber alam, nilai budaya gotong royong, dukungan kelembagaan desa, dan akses informasi. Sebaliknya, hambatan yang signifikan adalah keterbatasan pengetahuan teknis konservasi, ketergantungan ekonomi pada sistem pertanian konvensional, serta minimnya dukungan finansial dan teknis eksternal. Temuan ini menggarisbawahi bahwa konservasi berbasis masyarakat di Sembungan berjalan efektif karena perpaduan antara nilai-nilai lokal dan struktur kelembagaan yang inklusif.

D. Daftar Pustaka

- Adebayo, A. D., & Butcher, J. 2021. "Constraints and Drivers of Community Participation and Empowerment in Tourism Planning and Development in Nigeria." *Tourism Review International* 25(2–3):209–227.
- Agusti, V. N., & Wibawani, S. 2023. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kampung Edukasi Sampah Surabaya." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(1):111–123.
- Antwi, S. H., et al. (2025). *Public Participation in Environmental Decision-Making: A Water Sector Perspective*. Environmental and Sustainability Indicators.
- Asy'ari, R., & Putra. (2023). *Pembangunan berbasis masyarakat dan partisipasi lokal*.
- Asy'ari, R., & Putra, R. R. 2023. "Bibliometric: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 10(1):19–30.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. 2023. *Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change (2nd Ed.)*. Cambridge University Press.

- Blackman, A., Corral, L., Lima, E. S., & Asner, G. P. 2017. "Titling Indigenous Communities Protects Forests in the Peruvian Amazon." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)*, 114(16):4123–4128.
- Blackman, A., Corral, L., Lima, E. S., & Asner, G. P. (2017). Community-based resource management and environmental conservation.
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, T. M. 2021. "Local Community Participation and Responsible Tourism Practices in an Ecotourism Destination: A Case of Lower Kinabatangan, Sabah." *Sustainability* 13(23), 13.
- Chambers, R. (2017). *Rural Development: Putting the Last First*.
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar. (2021). Community participation in ecotourism and environmental sustainability.
- Creswell, John W. dan Creswell, J. David. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methode Approaches*. California: Fifth Edition. SAGE Publications.
- Dai, M., et al. (2024). *How to Enhance Public Participation in Environmental Governance*. *Sustainability*, 16(8).
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. 2015. *The Sage Handbook of Qualitative Research (5th Ed.)*. SAGE Publications.
- Dong, L., et al. (2023). *Public Participation and the Effect of Environmental Governance*. *Sustainability*, 15(5).
- Erbaugh, J. T., et al. (2024). *Communication and Deliberation for Environmental Governance*. *Annual Review of Environment and Resources*.
- Fritz, L., et al. (2024). *Public Engagement for Inclusive and Sustainable Governance*.
- Ginting, N. (2023). Community participation in sustainable tourism: A case study of local involvement in tourism destination management. *Environment-Behaviour Proceedings Journal (E-BPJ)*.
- Hassan, M. S. (2026). Local community involvement and its impacts on ecotourism sustainability: A systematic literature review from Borneo. *Discover Sustainability*.
- Iqbal, A., Ramachandran, S., Siow, M. L., Subramaniam, T., & Afandi, S. H. M. 2022. "Meaningful Community Participation for Effective Development of Sustainable Tourism: Bibliometric Analysis towards a Quintuple Helix Model." *Journal of Outdoor Recreation and Tourism* 39, 100523.
- Iswandono, E., Zuhud, E. A. M., Hikmat, A., Kosmaryandi, M. Y., & Nandi, N. 2015. "Integrating Local Culture into Forest Conservation: A Case Study of the Manggarai Tribe in Ruteng Mountains, Indonesia." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 21(2):55–64.
- Latifah, N., Ningsih, Y., Indry, & Assyahri, W. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari di Sumatera Barat. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 47–54.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. 2016. "Environmental Governance. *Annual Review of Environment and Resources*." 41:297–325.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2016). *Environmental governance and community participation*.
- Maulina, R. D. (2024). Strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional FISIP.
- Patton, M. Q. 2022. *Qualitative Research and Evaluation Methods (5th Ed.)*. SAGE Publications.

- Qodriyatun, S. N.(2019). 2019. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif.” *Kajian* 24(1):1–15.
- Rahmawati, R., et al. (2024). *Aspects of community participation in eco-tourism: A systematic review. Journal of Multidisciplinary Research Advancements*, 2(1), 71–79.
- Tiwari, S., Marahatta, D., & Devkota, H. P. (2024). Aspects of community participation in eco-tourism: A systematic review. *Journal of Multidisciplinary Research Advancements*, 2(1), 71–79.
- Zhang, Y., et al. (2020). *How Important Is Community Participation to Eco-Environmental Protection in Protected Areas?* Science of the Total Environment.